



DISERTASI

**FRAMEWORK INVESTIGASI MUTU
PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN PUBLIK
PADA PROSES AUDIT OLEH PIHAK
AUDITOR DAN PENYIDIK**

Oleh:

Nama: Herry Ludiro Wahyono
NIM. 21010112510007

Diajukan sebagai Bahan Ujian Terbuka Naskah Disertasi
dan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Doktor Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

**PROGRAM DOKTOR TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

Desember 2018

HALAMAN PENGESAHAN



NASKAH DISERTASI

FRAMEWORK INVESTIGASI MUTU

PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN PUBLIK PADA PROSES

AUDIT OLEH PIHAK AUDITOR DAN PENYIDIK

Oleh:

Nama: Herry Ludiro Wahyono
NIM. 21010112510007

Diajukan sebagai Bahan Ujian Terbuka Naskah Disertasi
dan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Doktor Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Semarang, Desember 2018
Mahasiswa,

(Herry Ludiro Wahyono)
NIM. 21010112510007

Menyetujui:
Promotor Ko-Promotor

(Prof. Dr. Ir. Rizal Z Tamin, M.Sc.) (Jati Utomo D.H., S.T., M.M., M.Sc, Ph.D)

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Teknik Sipil UNDIP

(Prof. Dr. Ir. Suripin, M.Eng.)
NIP. 196004271987031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan ridho-Nya sehingga laporan disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini membahas tentang audit oleh *stakeholder* pada proyek konstruksi gedung setelah tahap FHO. Selama ini bila Auditor atau Penyidik akan melakukan audit pada hasil pelaksanaan konstruksi, maka Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa merasa khawatir, karena pelaksana audit berbeda kompetensi dengan pelaksana Penyedia Jasa Konstruksi sehingga kecenderungan laporan hasil audit hanya pada sisi akuntansi dan atau ketentuan hukum bukan dari dasar teknis, oleh karena itu perlu ada penelitian yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Disertasi ini diberi judul “Framework Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Pada Proses Audit Oleh Pihak Auditor dan Penyidik” disusun sebagai bahan Ujian Terbuka, dan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Doktor Teknik Sipil di Universitas Diponegoro. Disertasi ini diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang audit mutu bangunan publik khususnya Bangunan Gedung, mengingat literatur yang berhubungan dengan hal ini masih belum banyak.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro, Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Teknik Undip, Ilham Nurhuda, ST., MT., Ph. D. selaku Ketua Departemen Teknik Sipil Undip, Fakultas Teknik Undip., Ibu Dr. Diyah Ari Wulandari, ST., MT. selaku Sekretaris Departemen Teknik Sipil Undip, Fakultas Teknik Undip, Prof. Dr. Ir. Suripin, M. Eng. selaku Ketua Program Doktor Teknik Sipil Undip, Dr. Ir. Nuroji, MS selaku Sekretaris Program Doktor Teknik Sipil Undip, ibu Prof. Dr. Ir. Sri Prabandiyani RW, M. Sc. selaku Ketua Program Doktor Teknik Sipil Undip periode 2012 s.d. 2016 yang telah berkenan memberikan izin penulis menempuh studi S3 di Program Studi Doktor Teknik Sipil.

Disampaikan pula ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ir. Supriyadi, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang atas kesempatan, doa, motivasi dan dukungan selama ini, begitu pula kepada yang terhormat Ibu Dianita Ratna Kusumastuti, ST., MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Polines yang telah

memberikan ijin kepada penulis untuk menempuh studi program S3 dan selalu memberi motivasi agar tetap semangat dalam menyelesaikan studi.

Penulis juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin, M.Sc. selaku Promotor dan Jati Utomo Dwi Hatmoko, S.T., M.M., M.Sc., Ph.D. selaku Ko-Promotor yang telah menyediakan waktu memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph. D. selaku Penanggung Jawab / Ketua Sidang Penguji, Prof. Dr. FX. Joko Priyono, SH., M.Hum. selaku Penguji, Ferry Hermawan, S.T., M.T., Ph.D. selaku Penguji dan Prof. Dr. Ir. Puti F. Marzuki selaku Penguji pada Ujian Kelayakan, dosen DTS, para Pakar, *Stakeholder* Konstruksi, dan rekan-rekan Mahasiswa DTS yang telah memberi masukan dan dukungan sehingga tersusunnya disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa walaupun penyusunan disertasi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh namun masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu penulis masih berharap masukan dan koreksi sehingga dapat bermanfaat dalam perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini. Demikian, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi kita semua, Amin yRa.

Semarang Desember 2018

Penulis,

Herry Ludiro Wahyono

NIM. 21010112510007

ABSTRAK

Diskrepansi atas hasil konstruksi bangunan dan rendahnya mutu konstruksi menjadi topik yang menarik sejak awal orde reformasi, hal itu disebabkan oleh pengendalian mutu konstruksi yang belum berjalan sesuai seharusnya. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah kasus hukum yang melibatkan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.. Dari laporan tahunan KPK pada periode 2004-2017 menunjukkan peningkatan kasus kegagalan konstruksi rata-rata 184 % per tahun dari 202 kasus, BPK pada periode yang sama melaporkan 232 kasus, terjadi peningkatan 104% per tahun. Oleh karena itu pemerintah melalui kementerian PUPR berupaya memperkuat fungsi teknis kontrol mutu dengan mengembangkan peralatan uji mutu dan sumber daya manusia konstruksi yang kompeten.

Penelitian ini bermaksud merumuskan kesepahaman antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dengan Auditor dan Penyidik terhadap diskrepansi mutu pekerjaan konstruksi bangunan publik, dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis tentang faktor-faktor diskrepansi, serta merumuskan pengertian diskrepansi dengan mengembangkan *framework* investigasi mutu pekerjaan konstruksi bangunan publik yang dapat diterima Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Auditor dan Penyidik.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan melalui stakeholder proyek. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) faktor diskrepansi mutu adalah biaya, waktu dan mutu. Mutu meliputi syarat administrasi, syarat teknis dan volume; (2) diskrepansi adalah ketidaksesuaian antara hasil pelaksanaan konstruksi dengan kontrak atas hasil audit investigasi mutu oleh Auditor dan Penyidik dengan uji dan perhitungan teknis oleh Ahli Konstruksi Bangunan; (3) *framework* investigasi mutu dengan melihat diskrepansi pada dua perspektif audit mutu: pertama, audit menurut kontrak kerja apabila terjadi perbedaan hasil pelaksanaan dengan kontrak harus diselesaikan dengan penyelesaian (resolusi) dengan denda senilai dengan ketidaksesuaian yang terjadi. kedua, hasil audit teknis menurut pertimbangan Ahli Konstruksi Bangunan dan penyelesaiannya melalui pengadilan Tipikor. Indikasi diskrepansi pada perspektif kedua hanya ada dua keputusan, selesai atau proses penyelesaian perselisihan (*dispute*) dan jika persoalannya dibawa ke pengadilan maka termasuk pada ranah perdata.

Kata kunci: *framework*,. investigasi mutu, bangunan publik dan diskrepansi.

ABSTRACT

The discrepancy over the results of building construction and the low quality of construction has been an interesting topic since the beginning of the reform order, this was due to the quality control of construction that had not yet proceeded accordingly. This was marked by an increase in the number of legal cases involving Service Users and Service Providers. From the annual report of the KPK in the period 2004-2017 it showed an increase in cases of construction failures averaging 184% per year from 202 cases, the BPK in the same period reported 232 cases, there is a 104% increase per year. Therefore the government through the Ministry of PUPR seeks to strengthen the technical functions of quality control by developing competent quality testing and construction human resources.

This study intends to form an understanding between Service Users and Service Providers with Auditors and Investigators on the quality discrepancy of public building construction work, with the aim of identifying and analyzing discrepancy factors and formulating an understanding of discrepancy by developing an acceptable framework for investigating the quality of public building construction work. Service User, Service Provider, Auditor and Investigator.

Research data is collected by means of field observations and structured interviews with through project stakeholders. The data was analyzed using case study analysis. The results of this study are: (1) the factor of quality discrepancy is cost, time and quality. Quality includes administrative requirements, technical requirements and volume; (2) a discrepancy is a discrepancy between the results of the implementation of construction and a contract on the results of a quality investigation audit by the Auditor and Investigator with a technical test and calculation by a Building Construction Expert; (3) quality investigation framework by looking at discrepancies in two quality audit perspectives: first, the audit according to the work contract in the event of a difference in the results of the implementation with the contract must be resolved (resolution) with a fine worth the nonconformity. second, the results of the technical audit according to the considerations of the Construction Expert and its resolution through the Corruption Court. An indication of discrepancy in the second perspective is that there are only two decisions, completed or the process of dispute resolution and if the problem is brought to court it is included in the civil domain.

Keywords: framework ,. quality investigation, public buildings and discrepancies.

DAFTAR ISI

Cover	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISTILAH.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Perumusan Masalah	3
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Kebaruan	4
1.6. Manfaat Penelitian	5
1.7. Pembatasan Masalah	5
1.8. Sistematika Penulisan Disertasi	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	8
2.1. Bangunan Publik.....	8
2.1.1. Sistim Desain Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik.....	9
2.1.2. Sistem Tata Ruang Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik.	9
2.1.3. Sistem Komplek Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik	10
2.1.4. <i>Masterplan</i>	12
2.1.5. Siklus Proyek Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik.....	12
2.1.6. Kontrak.....	18
2.1.6.1. Kontrak Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik	18
2.1.6.2. Isi Kontrak Kerja Konstruksi.....	19
2.1.7. Bisnis Konstruksi	21

2.2.	Konstruksi Sukses	22
2.2.1.	Biaya Proyek	24
2.2.2.	Mutu Proyek.....	24
2.2.3.	Waktu Proyek.....	25
2.3.	Audit.....	25
2.3.1.	Jenis Audit.....	26
2.3.2.	<i>Scope</i> Audit	27
2.3.3.	Bidang Audit	27
2.3.4.	Auditor	28
2.3.5.	Regulasi Yang Mengatur Ahli Konstruksi Bangunan.....	31
2.4.	Penyidik	32
2.4.1.	Penyidik Kepolisian	32
2.4.2.	Penyidik Kejaksaan.....	33
2.4.3.	Penyidik KPK	34
2.5.	Tugas, Kewenangan,Fungsi Auditor dan Penyidik.....	35
2.6.	<i>Stakeholder</i> Investigasi Mutu Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik.....	46
2.6.1.	Pengguna Jasa	48
2.6.2.	Penyedia Jasa	48
2.6.2.1.	Penyedia Jasa Perencanaan	48
2.6.2.2.	Penyedia Jasa Pengawasan	49
2.6.2.3.	Penyedia Jasa Pelaksanaan	49
2.7.	Pengendalian Mutu Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik.....	49
2.7.1.	Pengendalian Mutu Masa Kontrak Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik..	50
2.1.7.1.	Pengendalian Mutu Pada Tahap Perancangan Konstruksi	50
2.1.7.2.	Pengendalian Mutu Pada Proses Penyerahan Proyek (<i>Project Dilevery</i>) Tahap Enjinering Desain.....	52
2.1.7.3.	Pengendalian Mutu Pada Proses Penyerahan Proyek (<i>Project Dilevery</i>) Tahap Pelaksanaan Konstruksi	52
2.1.7.4.	Mekanisme Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Pada Tahap Kontrak oleh Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Inspektorat Eksisting ..	58

2.7.2.	Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Pada Proses Audit oleh Auditor dan Penyidik Setelah Tahap FHO	63
2.7.2.1.	Tugas dan Kewenangan Auditor dan Penyidik Pada Proses Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik.....	65
2.7.2.2.	Mekanisme Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Pada Proses Audit oleh Auditor dan Penyidik setelah Tahap FHO.....	73
2.8.	Perselisihan Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Publik.....	78
2.1.8.	Perselisihan Konstruksi Pada Masa Kontrak Kerja Konstruksi.....	78
2.1.9.	Perselisihan Konstruksi Setelah Tahap FHO Pada Pekerjaan Konstruksi Publik.	80
2.1.10.	Regulasi Yang Mengatur Sangsi Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik	81
2.9.	Permasalahan Kegagalan Mutu Konstruksi Bangunan: Refleksi Pengalaman Indonesia dan Beberapa Negara.....	82
2.10.	Penerapan Hukum Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik	87
2.11.	Konsepsi Penelitian.....	88
2.11.1.	Metode Penelitian Kuantitatif	88
2.11.2.	Metode Penelitian Kualitatif	89
2.11.2.1.	Studi Fenomenologis (<i>Phenomeuological Study</i>).....	90
2.11.2.2.	Teori Beralas (<i>Grounded Theory</i>)	90
2.11.2.3.	Studi Kasus (<i>Case Study</i>)	91
2.11.3.	Metode Analisis Delphi	92
2.11.4.	Metode Pengumpulan Data.....	96
2.11.5.	Roadmap Penelitian	98
2.11.6.	Posisi Penelitian Ini Terhadap Penelitian Yang Sudah Dilakukan	103
2.11.7.	Kerangka Berpikir Penelitian.....	104
2.11.8.	Proposisi Penelitian.....	104
BAB 3	METODE PENELITIAN	108
3.1.	Pendahuluan	108
3.2.	Tempat dan Waktu Penelitian	108
3.3.	Tahapan Penelitian.....	109
3.4.	Skenario Penelitian	109

3.4.1. Strategi Penelitian	111
3.4.2. Metode Analisis Studi Kasus	111
3.4.2.1. Pencocokan Pola (<i>Pattern Matching</i>).....	111
3.4.2.2. Membangun Suatu Penjelasan (<i>Explanation Building</i>).....	112
3.4.2.3. Analisis Deret Waktu (<i>Time Series</i>)	112
3.5. Data	113
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	113
3.6.1. Data Primer	113
3.6.2. Data Sekunder	113
3.7. Variabel dan Instrumen Penelitian.....	114
3.8. Analisis Data	114
3.8.1. Analisis Kualitatif	114
3.8.2. Analisis Kuantitatif	115
BAB 4 KOMPILASI DAN ANALISIS DATA.....	116
4.1. Pendahuluan.....	116
4.2. Observasi Lapangan.....	116
4.2.1. Data Observasi	117
4.2.2. Analisis Data Hasil Observasi.....	121
4.2.3. Analisis Mendalam Kasus Observasi.....	132
4.2.3.1. Kasus Gdg. 29.....	133
4.2.3.2. Kasus Gdg. 30.....	134
4.2.3.3. Kasus Gdg. 31	136
4.2.3.4. Kasus Gdg. 38.....	138
4.3. Wawancara.....	141
4.3.1. Data Wawancara	142
4.3.2. Analisis Data Hasil Wawancara.....	153
BAB 5 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	162
5.1. Pembahasan Hasil Observasi	162
5.2. Pembahasan Hasil Wawancara	162
5.2.1. Faktor-Faktor Pengaruh Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik: Perspektif Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, Auditor serta Penyidik .	163

5.2.2.	Diskrepani Investigasi Mutu Menurut Perspektif <i>Stakeholder</i> Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik	165
5.3.	Pendefinisian Diskrepani Mutu Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik	169
5.4.	<i>Framework</i> Investigasi Mutu Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Menurut Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Auditor dan Penyidik.....	170
5.4.1.	<i>Framework</i> Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Yang Relevan Menurut Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa	171
5.4.2.	<i>Framework</i> Investigasi Mutu Pada Proses Audit Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Yang Relevan Menurut Auditor dan Penyidik	171
5.4.3.	Pengembangan <i>Framework</i> Investigasi Mutu Pada Proses Audit Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Yang Relevan Menurut Pengguna Jasa, Penyedia Jasa Auditor dan Penyidik.....	175
5.4.4.	Validasi Pengembangan <i>Framework</i> Audit Investigasi Mutu Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik	179
5.4.5.	Korelasi <i>Framework</i> Audit Investigasi Mutu Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Terhadap Penelitian Yang Ada.....	182
BAB 6 KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN		184
6.1.	Kesimpulan	184
6.2.	Implikasi.....	185
6.3.	Saran.....	185
DAFTAR PUSTAKA.....		187
REGULASI.....		201

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rangkuman Tugas, Fungsi, Kewenangan Auditor dan Penyidik pada proses Audit Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik	36
Tabel 2. 2. Kewenangan Audit oleh Pihak Auditor dan Penyidik pada Proyek Konstruksi.....	66
Tabel 2. 3. Kewenangan Audit oleh Pihak Auditor dan Penyidik pada Proyek Konstruksi... <i>lanjutan</i>	67
Tabel 2 4 Kewenangan Audit <i>Stakeholder</i> pada Siklus Proyek	68
Tabel 2 5. Uraian Mekanisme Mutu pada Proyek Konstruksi.....	68
Tabel 2.6. Mekanisme Investigasi Mutu pada Bangunan Publik oleh Auditor dan Penyidik saat ini.....	70
Tabel 2.7. Mekanisme Investigasi Mutu pada Bangunan Publik oleh Auditor dan Penyidik saat ini... <i>lanjutan</i>	71
Tabel 2.8. Mekanisme Investigasi Mutu pada Bangunan Publik oleh Auditor dan Penyidik saat ini... <i>lanjutan</i>	72
Tabel 2 9. Beberapa Kasus Kegagalan Konstruksi dan Bangunan di Indonesia dalam Kurun Waktu 1998-2014 (Diadaptasi dari Hermawan, 2015).....	85
Tabel 2 10. Fase Perubahan Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Periode Pra 1945-2017.....	84
Tabel 2 11. Perbedaan Karakteristik Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif (Liamputtong, 2013; Creswell, 2013; Tashakkori, 2010).....	93
Tabel 2 12. Hasil Penelitian pada Masa Kontrak (Tanda Tangan Kontrak s.d. PHO) ...	99
Tabel 2 13. Hasil Penelitian pada Masa Pemeliharaan (PHO s.d. FHO).....	100
Tabel 2 14. Hasil Penelitian setelah Penyerahan ke-II / FHO	101
Tabel 2 14. Hasil Penelitian setelah Penyerahan ke-II / FHO... <i>lanjutan</i>	102
Tabel 2 15.. Posisi Penelitian Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik.	103
Tabel 4.1. Data Proyek	117
Tabel 4.2.. Data Profil Proyek	120
Tabel 4. 3. Daftar ID Proyek.....	120
Tabel 4. 4. Daftar Proyek yang Tidak Sesuai Mutu dan Sesuai Mutu.....	122
Tabel 4. 5. Proyek yang Dianalisis Lebih Lanjut	124

Tabel 4. 6. Nilai Kontrak Proyek Tidak Sesuai Mutu	125
Tabel 4. 7. Kualifikasi Proyek Tidak Sesuai Mutu terhadap Keppres No. 80, 2003....	125
Tabel 4. 8. Jumlah Kualifikasi Proyek Tidak Sesuai Mutu terhadap Keppres No. 80, 2003	126
Tabel 4. 9. Ringkasan Permasalahan pada Proyek	126
Tabel 4. 10. Rincian Tidak Sesuai Mutu Spesifikasi Administrasi	128
Tabel 4. 11. Rincian Tidak Sesuai Mutu Spesifikasi Teknis	128
Tabel 4. 12. Rincian Tidak Sesuai Mutu Biaya Pekerjaan	128
Tabel 4. 13. Rincian Tidak Sesuai Mutu Waktu Penyelesaian Pekerjaan	128
Tabel 4. 14. Tidak Sesuai Mutu Spesifikasi Administrasi yang Sering Terjadi	130
Tabel 4. 15. Tidak Sesuai Mutu Spesifikasi Teknis yang Sering Terjadi.....	131
Tabel 4. 16. Tidak Sesuai Mutu Volume Pekerjaan yang Sering Terjadi	131
Tabel 4. 17. Data Profesi Responden.....	142
Tabel 4. 18. Profil Profesi Responden	143
Tabel 4. 19. Ringkasan tentang Spesifikasi Teknis dari Hasil Wawancara.....	145
Tabel 4. 20. Ringkasan tentang Volume dari Hasil Wawancara	146
Tabel 4. 21. Ringkasan tentang Investigasi Mutu dari Hasil Wawancara	147
Tabel 4. 22. Ringkasan tentang Perbedaan Persepsi Para Pihak dari Hasil Wawancara	149
Tabel 4. 23. Ringkasan tentang Regulasi yang Mengatur dari Hasil Wawancara.....	151
Tabel 4. 24. Ringkasan tentang Fenomena yang Terjadi dari Hasil Wawancara	152
Tabel 4. 25. Analisis Persepsi antara Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor, serta Penyidik	154
Tabel 4. 26. Analisis Persepsi antara Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor, serta Penyidik	155
Tabel 4. 27. Analisis Persepsi antara Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor, serta Penyidik	156
Tabel 4. 28. Analisis Persepsi antara Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor, serta Penyidik	157
Tabel 4. 29. Analisis Persepsi antara Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor, serta Penyidik tentang Regulasi	158

Tabel 4. 30. Analisis Persepsi antara Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor, serta Penyidik tentang Fenomena.....	159
Tabel 4. 31. Hasil Analisis Persamaan Pendapat antara Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor, serta Penyidik	160
Tabel 4. 32. Hasil Analisis Perbedaan Pendapat antara Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor, serta Penyidik	161
Tabel 5. 1. Diskrepansi Dari Hasil Penelitian Pelaksanaan Konstruksi Penelitian Terdahulu	166
Tabel 5. 2. Diskrepansi hasil observasi pelaksanaan konstruksi dari kasus Gedung yang masuk ke Pengadilan dan menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap.	167
Tabel 5. 3. Diskrepansi hasil wawancara terhadap pelaksanaan konstruksi oleh pihak Pengguna dan Penyedia Jasa, Auditor serta Penyidik	168
Tabel 5. 4. Definisi Diskrepansi dari Hasil Wawancara Para Pihak terkait Konstruksi Bangunan Publik.....	170
Tabel 5. 5. Ringkasan Hasil Wawancara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.....	171
Tabel 5. 6. Ringkasan Regulasi Investigasi Mutu Audit Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik dari Auditor dan Penyidik.	174
Tabel 5. 7. Ringkasan Validasi Framework Investigasi Mutu oleh Pihak Internal dan Pihak Eksternal.	180

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Proses Penyelenggaraan Konstruksi Bangunan Publik (Suharto,1999; Husen, 2008; Stark, 2015)	11
Gambar 2. 2. Siklus Proyek (Suharto,1999; Husen, 2008; Stark, 2015)	13
Gambar 2. 3 . Desain Bid Build dalam Siklus Proyek.....	17
Gambar 2. 4. Proses Bisnis Konstruksi (Suharto,1999; Husen, 2008; Stark, 2015).....	23
Gambar 2. 5. Sasaran proyek merupakan tiga kendala (<i>triple constraint</i>)	23
Gambar 2. 6. Mutu dalam Proses Konstruksi (Malik, 2010; Ervianto, 2005).....	25
Gambar 2. 7. Investigasi Mutu Tahap Perancangan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik dalam Siklus Proyek.....	51
Gambar 2. 8 Pengendalian Mutu Tahap Enjinerig Desain Pada Konstruksi Bangunan Publik dalam Siklus Proyek.....	53
Gambar 2. 9 Pengendalian Mutu Pada Proses Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Publik antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (Malik, 2010; Ervianto, 2005)	55
Gambar 2. 10. Pengendalian Mutu Tahap Pelaksanaan Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik dalam Siklus Proyek.....	56
Gambar 2. 11. Audit Mutu oleh <i>Stakeholder</i> (Itjen dan Itwil) pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Saat Ini	57
Gambar 2.12. Struktur Pengelolaan Keuangan Negara (UU No.1, 2004).....	59
Gambar 2.13. Struktur Pengelolaan Keuangan Negara pada Satker (Satuan Kerja)	60
Gambar 2.14. <i>Fremework</i> Investigasi Mutu pada Masa Kontrak oleh Pihak Pengguna Jasa dan Pihak Penyedia Jasa (Perencana, Pengawas dan Pelaksana) - Eksisting	61
Gambar 2.15. <i>Fremework</i> Investigasi Mutu Audit Pada Masa Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dengan Auditor Inspektorat Terhadap Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik - Eksisting.....	62
Gambar 2.16. Investigasi Mutu Setelah Tahap FHO Pada Siklus Proyek.....	64
Gambar 2.17. Kewenangan Audit Pihak Eksternal Pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik - Eksisting.....	74
Gambar 2. 18 Mekanisme Audit oleh <i>Stakeholder</i> pada Proyek Konstruksi - Eksisting	75
Gambar 2.19. <i>Framework</i> Investigasi Mutu Pengguna Jasa, Penyedia Jasa (Perencana, Pengawas, Pelaksana)	76

Gambar 2.20. <i>Framework</i> Investigasi Mutu Pengguna Jasa, Penyedia Jasa (Perencana, Pengawas, Pelaksana) dengan POLISI atau JAKSA atau KPK - Eksisting	77
Gambar 2. 21. Kerangka Berpikir.....	107
Gambar 3. 1. Skenario Penelitian	110
Gambar 4. 1. Rincian Tidak Sesuai Mutu Volume Pekerjaan	129
Gambar 5. 1. <i>Framework</i> Investigasi Mutu Yang Relevan menurut Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa	172
Gambar 5. 2. <i>Framework</i> Investigasi Mutu Yang Relevan menurut Auditor dan Penyidik	173
Gambar 5. 3. Pengembangan <i>Framework</i> Audit Investigasi Mutu Pekerjaan Konstruksi Bangunan Publik Relevan menurut Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Auditor dan Penyidik.	176
Gambar 5. 4. Perbedaan <i>Framework</i> Investigasi Mutu pada Proses Audit Konstruksi Bangunan Publik pada Kondisi Eksisting dan Pengembangan Hasil Penelitian	178

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Penjelasan
Audit	proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur yang dilakukan SDM kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan
Audit Investigasi	serangkaian kegiatan reorganisasi (<i>reorganized</i>), mengidentifikasi (<i>identify</i>) dan menguji (<i>examine</i>) fakta-fakta, informasi dalam mengungkap kejadian sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas (organisasi / perusahaan / negara / daerah)
Auditor	perseorangan atau kelompok orang dengan kualifikasi audit tertentu dan dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan dan kegiatan dari suatu lembaga, kantor, perusahaan atau organisasi
Bangunan Publik	Bangunan sarana-prasarana umum, dibangun dengan biaya APBN dan / APBD
Bisnis	Kegiatan spekulasi yang penuh resiko
Infrastruktur	Bangunan sarana-prasarana publik
Mutu	Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan kontak (syarat umum, syarat administrasi, syarat teknis, kuantitas, biaya)
Pengendalian	Pengelolaan supaya sesuai tolok ukur / standar / ketentuan.
Pengguna Jasa	UU No. 2, 2017, pasal 1, ayat 5 adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi
Penyidik	Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada proses penegakan hukum pidana, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK.
Proyek	Pekerjaan konstruksi bangunan
Siklus Proyek	Rangkaian tahapan proyek mulai ide, studi kelayakan, pra rancangan, rancangan, lelang, pelaksanaan, PHO, masa pemeliharaan, FHO, operasional dan perawatan, serta pembongkaran dan pembangunan kembali.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BOT	<i>Build Operate Transfer</i> / Bangun-Operasi-Transfer
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BQ	<i>Bill of Quantity</i> / rincian kuantitas
BSB	Bukit Semarang Baru
CPT	<i>Cone Penetrometer Test</i>
DB	<i>Design and Build</i> / Desain dan Bangun
DBB	<i>Design Bid Build</i> / Desain-Lelang-Bangun
DBO	<i>Design-Build-Operate</i> / Desain-Bangun-Operasikan
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EE	<i>Engineering Estimate</i>
FHO	Final hand Over / Penyerahan kedua / Penyerahan yang terakhir
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
IMB	Ijin Mendirikan Bangunan
Inpres	Instruksi Presiden
Itjen	Inspektorat Jendral
Itwil	Inspektorat Wilayah
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Keppres	Keputusan Presiden
KP2KKN	Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LPJK	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
OE	<i>Owner Estimate</i>
PA	Pengguna Anggaran
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
PHO	Provision Hand Over / Penyerahan pertama
PP	Peraturan Pemerintah
PP Kom	Pejabat Pembuat Komitmen
PPBI	Pedoman Pemeriksaan Bidang Investigasi dari Kepala BPKP
PPHP	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PPTK	Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB	Rencana Anggaran Biaya
RKS	Rencana Kerja dan Syarat
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTH	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	Sumber Daya Air
SDM	Sumber Daya Manusia
SMKN	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SOP	<i>Standard Operational Procedure</i>
SPIP	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TOR	<i>Term of Reference</i> (Kerangka Acuan)
TP4D	Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
TP4P	Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945
WTO	<i>World Trade Organisation</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan
Lampiran-1	Konsen Form Responden
Lampiran-2	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Responden Pengguna dan Penyedia Jasa
Lampiran-3	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Responden Auditor
Lampiran-4	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Responden Penyidik
Lampiran-5	Analisa Data Observasi
Lampiran-6	Analisa Data Hasil Wawancara (transkrip, <i>coding</i> , tabel analisis)
Lampiran-7	Hasil Putusan Sidang
Lampiran-8	Validasi <i>Framework</i> Pengembangan Investigasi Mutu Konstruksi Bangunan Publik yang relevan dan dapat diterima oleh pihak Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, Auditor, dan Penyidik